

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era modern saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan modal yang besar untuk mendukung pembangunan nasional. Modal tersebut sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, baik di tingkat regional maupun global. Hingga saat ini, Indonesia masih belum sepenuhnya mampu menyediakan modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, investasi di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang dikenal sebagai Foreign Direct Investment (FDI). Aturan terkait investasi asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. FDI mencakup aliran modal internasional di mana perusahaan dari satu negara mendirikan atau memperluas operasi bisnisnya di negara lain, sehingga tidak hanya melibatkan transfer sumber daya tetapi juga pengendalian atas perusahaan di luar negeri (Krugman, 1994).

FDI dapat berupa modal atau dana, pembelian saham perusahaan Indonesia, atau pendirian perusahaan patungan. Sumber pembiayaan dari penanaman modal asing ini dianggap sebagai salah satu sumber dana yang paling potensial dibandingkan dengan sumber-sumber penanaman modal lainnya. Penelitian menegaskan bahwa penanaman modal asing atau Foreign

Direct Investment (FDI) memiliki peranan krusial dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dibandingkan dengan modal portofolio (Panayotou, 1998). Oleh karena itu, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam jangka panjang diperlukan beberapa syarat yang di antaranya adalah adanya investasi (Harrod & Domar, 1957). Adapun investasi dapat berbentuk investasi domestik maupun investasi asing (Hacche, 1979).

Investasi asing dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti transfer teknologi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan manajerial, rendahnya risiko usaha, serta potensi keuntungan yang lebih tinggi yang terkait dengan Penanaman Modal Asing (PMA) di suatu negara. Riset mengungkapkan bahwa lebih dari 80% modal swasta dan 75% investasi asing sejak tahun 1990 terus mengalir ke negara-negara dengan pendapatan menengah (Panayotou, 1998). Di kawasan Asia lainnya, angka tersebut hanya mencapai 60%, sementara di Amerika Latin hanya sebesar 20% (Sarwedi, 2002). PMA diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang menjelaskan ketentuan investasi asing, termasuk pengaturan yang memberikan definisi lebih jelas tentang investasi modal asing dan mekanisme yang ada di dalamnya:

“...kegiatan penanaman modal untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh investor asing, baik yang sepenuhnya menggunakan modal asing maupun yang bekerja sama dengan modal domestik” Pasal 1 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2007).

Kebijakan mengenai penanaman modal asing merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi negara, terutama terkait dengan penanaman modal asing. Ini mencakup perbaikan dalam kemudahan birokrasi, penghapusan hambatan regulasi, dan penyederhanaan proses perizinan baik untuk modal domestik maupun asing. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan penanaman modal asing mengalami perubahan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, yang menetapkan bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk penanaman modal. Selain itu, paket kemudahan investasi yang dicanangkan oleh pemerintah Jokowi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016.

Presiden Joko Widodo sering menekankan bagaimana investasi ini dapat memberikan pengaruh dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang diadakan pada tahun 2017 di Jakarta, ia menyampaikan bahwa investasi merupakan salah satu sumber pembiayaan utama bagi pembangunan nasional, di samping Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyoroti peran investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, mengingat bahwa APBN hanya dapat menyediakan sekitar 30% dari total dana yang diperlukan. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa investasi merupakan alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan modal (BPKP, 2017). Sejak awal masa jabatannya sebagai Presiden pada tahun 2014, Joko Widodo sering menegaskan bahwa Indonesia perlu berusaha keras untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI). Dalam rapat terbatas dengan kabinetnya, ia meminta agar setiap kementerian menyusun

kebijakan atau regulasi yang dapat memudahkan masuknya investasi asing ke Indonesia. Kemudahan dalam mekanisme ini akan mempengaruhi sektor riil dan berdampak nyata dalam menunjang perekonomian nasional (Sunardi, 2015).

Menurut Presiden Joko Widodo sendiri bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan modal dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terutama dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi Indonesia. Joko Widodo berpendapat bahwa salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan modal ini adalah melalui investasi asing (Rahmat & Akbar, 2017). Oleh karena itu, upaya kebijakan luar negeri yang mendorong masuknya investasi asing perlu dilakukan untuk menunjang kebutuhan modal pembangunan nasional, selain dari APBN.

Rizal Sukma, Direktur Eksekutif CSIS, mengemukakan dengan adanya kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan lebih terfokus pada pengembangan hubungan bilateral, yang berbeda dari Pemerintah sebelum Presiden Joko Widodo. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa meskipun Presiden Joko Widodo sering memilih untuk membangun hubungan dan kerja sama bilateral, pertemuan multilateral tetap menjadi salah satu aspek penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Irewati & Kartini, 2019). Di dalam pertemuan Belt and Road Summit ke-5, Presiden Joko Widodo yang hadir sebagai salah satu pembicara utama menyatakan bahwa kerjasama multilateral memiliki relevansi terhadap peningkatan daya saing Indonesia dalam hal investasi asing (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2020).

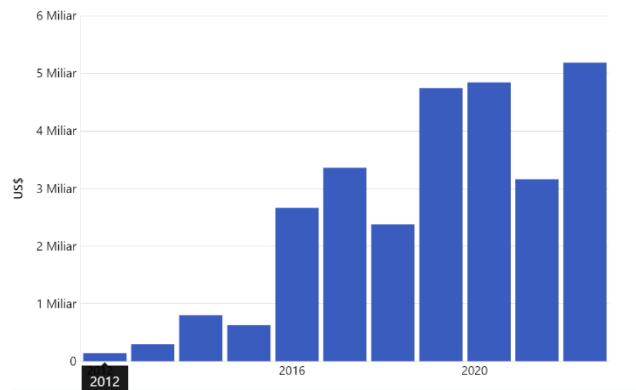
Di dalam konteks multilateral, keterlibatan negara-negara anggota dalam menangani suatu isu sering kali mencerminkan perbedaan pendapat yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan nasional masing-masing negara. Namun, melalui pembentukan kerjasama berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama dan penghawakan nilai-nilai kolektif, hasil yang diperoleh dapat memberikan dampak positif secara langsung. Selain itu, forum multilateral berperan sebagai platform bersama yang berfungsi sebagai penghubung, menampung ide-ide, serta langkah-langkah kolektif dalam menangani isu-isu tertentu. Meskipun pada akhirnya mungkin terdapat kesepakatan lain di luar agenda utama forum multilateral di antara negara-negara anggotanya, forum multilateral dapat dipandang sebagai fasilitator dalam mencapai kesepakatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 1999, seperti yang dikutip oleh Sarwedi, memperkirakan bahwa Foreign Direct Investment (FDI) di negara-negara berpendapatan rendah, atau negara berkembang, akan tumbuh sekitar 7-10% per tahun hingga akhir dekade tersebut (Sarwedi, 2002). Perkiraan ini didasarkan pada faktor-faktor seperti liberalisasi perdagangan, privatisasi, investasi teknologi, pengurangan biaya transportasi, perkembangan telekomunikasi, mobilitas modal, dan integrasi keuangan yang semakin meningkat. Selain itu, menurut World Investment Report, investasi asing global mengalami kenaikan signifikan antara tahun 1990 dan 2000, dengan nilai mencapai US\$ 209 juta, US\$ 437 juta, **dan** US\$ 1.118 juta. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi krisis keuangan di negara berkembang, pertumbuhan

aliran modal tetap berlangsung (UNCTAD), Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah investasi Foreign Direct Investment (FDI) terbanyak di negara-negara berkembang, diikuti oleh Jepang, Cina, Hong Kong, dan Belanda.

Pemerintah Indonesia secara aktif mendukung peningkatan investasi dari Tiongkok melalui beragam kebijakan yang telah ditetapkan. Pertama, menyediakan kepastian hukum bagi para investor. Kedua, memastikan keamanan dari potensi gangguan kriminal terhadap aset-aset berharga milik perusahaan investor. Ketiga, menawarkan kemudahan melalui paket insentif yang mencakup perjanjian investasi, imigrasi, kepabeanan, perpajakan, dan pertahanan wilayah. Keempat, memelihara iklim ketenagakerjaan yang mendukung keberlangsungan kegiatan usaha. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok mencakup berbagai sektor strategis, termasuk politik, keamanan, dan ekonomi. Kerjasama ekonomi antara kedua negara ini menunjukkan keterhubungan yang kuat dan memiliki daya tarik tersendiri, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, ekspor dan impor, serta pariwisata (Putri & Ma'arif, 2019). Berikut adalah Grafik Peningkatan Investasi asing Tiongkok di Indonesia dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Grafik 1.1 dibawah ini:

**Grafik 1.1 Peningkatan Investasi Tiongkok di Indonesia dari
Tahun 2012-2022**



*Sumber: Investasi Tiongkok di Indonesia Melonjak 63% pada 2022 yang
diolah oleh databoks.id*

Pada Grafik 1.2 menunjukkan bahwa realisasi peningkatan investasi Tiongkok di Indonesia pada Tahun 2012-2022 mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2012-2022, Pada tahun 2012-2015 menyentuh angka 1 Miliar US\$, Pada tahun 2016 meningkat menjadi 2 Miliar US\$ bahkan hampir menyentuh 3 Miliar US\$, Tahun 2017 naik menyentuh 3 Miliar US\$, sedangkan pada Tahun 2018 Investasi Tiongkok di Indonesia menurun menjadi 2 Miliar US\$, Tahun 2019 dan 2020 melonjak pesat hampir menyentuh 5 miliar US\$, Sedangkan pada Tahun 2021 menurun menjadi 3 Miliar US\$ dan pada tahun 2022 menjadi pelonjakan menjadi 5 Miliar US\$. Dalam laporan BKPMRI investasi utama yang menjadi tujuan Tiongkok di 5 sektor yaitu industri smelter nikel, smelter bauksit, industri kaca, makanan, kelapa sawit, pembangkit listrik Tiongkok menganggap Indonesia sebagai mitra dagang strategis, terutama dalam kebutuhan impor terhadap komoditas seperti kakao, karet, besi, produk

kimia, dan minyak serta gas. Indonesia juga dapat memanfaatkan kemitraan strategis dengan negara-negara yang dilalui oleh Jalur Sutra Tiongkok, mulai dari negara-negara anggota ASEAN hingga Eropa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka terdapat pertanyaan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan investasi asing dalam pemerintahan Joko Widodo mempengaruhi peningkatan investasi asing Tiongkok di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ada dua yaitu sebagai berikut:

Menganalisa bagaimana kebijakan pemerintah di bawah Presiden Jokowi, seperti regulasi, insentif, dan reformasi birokrasi, mempengaruhi keputusan investasi asing Tiongkok di sektor infrastruktur.

Mengidentifikasi manfaat dari adanya Investasi Tiongkok kepada Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya latar belakang masalah dalam penelitian serta adanya rumusan masalah yang dijelaskan pada bagian sebelumnya maka, penelitian dilakukan untuk:

Manfaat Akademis:

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Mahasiswa lain khususnya dari jurusan Hubungan Internasional tentang “Kebijakan Jokowi dalam meningkatkan Investasi asing Tiongkok kepada Indonesia”

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman teori Liberalisme Ekonomi dalam Konteks isu Investasi Asing antara kedua negara

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya dalam eksplorasi hubungan antara Liberalisme dalam Investasi asing yang ada di Indonesia

Manfaat Praktis:

Mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil oleh Jokowi dalam Investasi asing dalam memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek

Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gagasan atau kebijakan yang baru dan lebih efektif dalam meningkatkan Investasi asing Tiongkok di Indonesia

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 State of The Art

Investasi asing adalah kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan Tiongkok telah menjadi salah satu investor terbesar dan paling berpengaruh. Hubungan ekonomi antara kedua negara semakin erat, terutama melalui proyek-

proyek besar di sektor infrastruktur, energi, manufaktur, dan teknologi, yang sejalan dengan inisiatif Belt and Road (BRI). Investasi Tiongkok membawa manfaat seperti aliran modal, transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan infrastruktur. Namun, diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah Indonesia untuk memastikan manfaat maksimal dari investasi ini. Penelitian yang dilakukan Zahidiputra.M.Puar yang dimana dalam pembahasannya membahas tentang “Pengaruh Investasi China ke Indonesia,Ekspor Indonesia-China dan Tenaga kerja terhadap pertumbuhan Ekonomi Nasional” ,dalam penelitiannya memberikan kontribusi serta bagaimana Investasi asing dapat memberikan dampak dalam berbagai aspek Ekonomi di Indonesia (Zahidiputra, 2020).

Dalam penelitian itu sendiri memberikan penjelasan dalam jurnalnya ialah Investasi dari Tiongkok ke Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi ini mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, manufaktur, energi, dan teknologi, yang memperkuat perekonomian Indonesia melalui aliran modal, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Ekspor Indonesia ke Tiongkok juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dan peningkatan ekspor ke Tiongkok telah membantu menyeimbangkan neraca perdagangan serta mendorong pertumbuhan industri lokal. Tenaga kerja Indonesia juga mendapatkan manfaat dari investasi dan hubungan dagang dengan Tiongkok. Transfer teknologi dan peningkatan keterampilan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia

telah meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, investasi Tiongkok, ekspor ke Tiongkok, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja telah memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Namun, untuk memaksimalkan manfaat ini, diperlukan kebijakan yang tepat dan kerjasama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta (Medina-Smith, 2000).

Sedangkan dalam penelitian Putra Siregar yang berjudul "Pengaruh Investasi Tiongkok terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Uji Kausalitas Granger", yang dimana membahas tentang bagaimana Hubungan Kausal yang memiliki Uji kausalitas Granger yang menunjukkan bahwa investasi Tiongkok secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, menegaskan adanya hubungan sebab-akibat, yang kedua adanya Transfer Teknologi dan Pengetahuan Investasi dari China membawa teknologi dan pengetahuan baru ke Indonesia, meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor. Yang ketiga adanya Peningkatan Infrastruktur yang dimana Investasi China dalam proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan listrik berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian, adanya Penciptaan Lapangan Kerja Investasi China menciptakan banyak lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan konsumsi domestik. Yang kelima adanya Diversifikasi Ekonomi Investasi China membantu mendiversifikasi ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional dan mendorong pengembangan sektor-sektor baru seperti manufaktur dan teknologi.

Yang terakhir adanya Dampak Jangka Panjang Meskipun investasi China memberikan dampak positif dalam jangka pendek, penelitian menyoroti perlunya strategi jangka panjang yang berkelanjutan untuk memastikan manfaat investasi ini terus dirasakan di masa depan. Yang bisa ditarik kesimpulan bahwa Investasi asing yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Indonesia sendiri membawa dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya hubungan kausal yang kuat, diharapkan investasi ini akan terus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang tepat untuk mengelola investasi ini agar dampaknya dapat dimaksimalkan dan merata di seluruh sektor ekonomi (Siregar, 2023).

Penelitian yang ketiga ialah tentang Upaya Peningkatan Investasi dan Ekspor Indonesia di tengah Deflasi China dan Pascapemilu 2024” yang ditulis oleh Rafika Sari yang menganalisis strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor Indonesia di tengah situasi deflasi di China dan setelah Pemilu 2024, yang dimana membahas tentang Kondisi Ekonomi Global Situasi deflasi di China mempengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia. Deflasi dapat menyebabkan penurunan permintaan global dan harga komoditas, yang berdampak pada ekspor Indonesia. Yang kedua membahas tentang Dampak Pascapemilu 2024 yang dimana, Indonesia menghadapi tantangan politik dan ekonomi baru yang dapat mempengaruhi iklim investasi dan perdagangan. Kebijakan pemerintah yang baru perlu fokus pada stabilitas ekonomi dan peningkatan daya saing. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah, Dalam menghadapi tantangan deflasi di China dan dinamika politik pascapemilu

2024, Indonesia harus mengadopsi strategi yang fokus pada meningkatkan investasi dan ekspor. Kebijakan yang mendukung dan kolaborasi internasional yang solid akan menjadi kunci dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi jangka panjang (Sari, 2024).

Penelitian yang keempat ialah berjudul “Pengaruh Investasi China Terhadap Penanganan Ketenagakerjaan Asing di Indonesia” yang ditulis oleh Suciliani Octavia (2017) yang dimana di dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana Dinamika Politik Indonesia dan China pada sector Ekonomi. Di dalam Penelitian ini juga dijelaskan bahwa Investasi China di negara-negara lain juga telah memunculkan berbagai dinamika yang kompleks termasuk Indonesia. Meskipun diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, investasi asal China ternyata juga memicu dampak yang meluas (Octavia, 2017).

Dampak sosialnya juga terlihat dari peningkatan jumlah tenaga kerja tidak terampil yang berasal dari China, terutama dalam sektor manufaktur dan infrastruktur yang dimiliki investor China. Kehadiran mereka sering kali memperebutkan lapangan kerja dengan tenaga kerja lokal, meskipun kebanyakan dari mereka adalah pekerja kasar dan bukan tenaga kerja terampil. Selain itu, masuknya mereka seringkali dilakukan secara ilegal dengan memanipulasi status keahlian mereka, terlihat dari beberapa kasus di mana visa kerja mereka sebenarnya untuk tenaga kerja terampil padahal kualifikasinya sebatas pekerja kasar. Penelitian terakhir yang dapat kita lihat ialah “Dampak kerjasama Indonesia-China Dalam Proyek Investasi Nikel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi kedua Negara” yang ditulis oleh yang dimana membahas tentang kerja sama

antar negara telah menjadi bagian integral dari hubungan internasional. Setiap langkah yang diambil oleh suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya sendiri, termasuk kerja sama antara Indonesia dan China.

Salah satu bentuk kerja sama yang sedang ditekankan adalah investasi dalam proyek pembangunan smelter nikel. Indonesia saat ini memiliki 26 smelter nikel dan diharapkan jumlah ini akan terus bertambah dalam beberapa tahun mendatang. Adanya kolaborasi dalam proyek investasi nikel memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara. Bagi Indonesia, investasi ini meningkatkan pendapatan negara melalui proses hilirisasi, menciptakan lapangan kerja yang mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan masuknya investasi asing. Di sisi lain, China juga merasakan manfaat dengan meningkatnya investasi mereka di Indonesia dan menjaga rantai pasokan nikel dari Indonesia. Kerja sama ini menciptakan ketergantungan saling berkelanjutan di mana Indonesia memerlukan investasi dari China untuk pembangunan smelter, sementara China membutuhkan pasokan nikel dari Indonesia untuk kegiatan manufaktur mereka.

State of the Art dari Jurnal-Jurnal yang telah disebutkan telah menunjukkan bahwa adanya variasi, pendekatan serta focus dalam konteks “Analisis Kebijakan investasi asing dalam Pemerintah Jokowi Dodo terhadap Peningkatan Investasi Tiongkok ke Indonesia”. Penelitian yang pertama yang ditulis oleh Zahidiputra M. Puar (2020) yang membahas tentang bahwa investasi China di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi tersebut, bersama

dengan ekspor Indonesia ke China dan tenaga kerja, secara parsial dan simultan memberikan kontribusi positif yang kuat terhadap ekonomi Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya investasi asing, khususnya dari China, dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi jangka panjang di Indonesia. Penelitian yang kedua yaitu tentang bagaimana investasi China memiliki dampak signifikan dan positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Analisis menunjukkan adanya hubungan kausal yang kuat antara investasi China dan peningkatan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya investasi asing, terutama dari China, dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan yang efektif diperlukan untuk mengelola dan memaksimalkan dampak positif dari investasi ini di berbagai sektor ekonomi.

Dalam Penelitian yang ketiga ialah yang ditulis oleh Rafika Sari (2024) yang membahas tentang bagaimana Pemilu yang diadakan pada bulan Februari juga memberikan dampak dalam Investasi Cina ke Indonesia serta bagaimana Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan Investasi China di tengah Deflasi China. Dalam Penelitian yang keempat yang ditulis oleh Suciliani Octavia (2017), membahas tentang bagaimana Investasi yang dilakukan China di Indonesia yang memberikan serta membawa imbas yang signifikan terhadap dinamika ketenagakerjaan asing di Indonesia. Meskipun diharapkan meningkatkan pembangunan ekonomi, investasi ini menyebabkan kontroversi terkait kebijakan pemerintah dan ketergantungan pada tenaga kerja asing dari China. Banyak pekerja kasar dari China masuk secara ilegal dan

mengisi posisi yang seharusnya diisi oleh tenaga kerja lokal, menimbulkan isu sosial dan ekonomi di Indonesia. Penelitian yang terakhir adalah Putri Zahra Fauziyyah (2023) dalam Penelitian ini membahas tentang bagaimana kerja sama investasi di sektor nikel antara Indonesia dan China membawa keuntungan bagi kedua Negara. Dimana bagi Indonesia sendiri keuntungan yang dapat dilihat ialah ini meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan menarik lebih banyak investasi asing. Sedangkan bagi China sendiri, investasi ini menjaga rantai pasokan nikel yang vital untuk industri manufaktur mereka. Kerja sama ini menciptakan ketergantungan timbal balik, di mana Indonesia membutuhkan investasi untuk pembangunan, dan China memerlukan pasokan nikel dari Indonesia. Jurnal-jurnal di atas telah menunjukkan bahwa secara bersama-sama menyajikan berbagai perspektif dan wawasan tentang Investasi Asing Tiongkok di Indonesia. Investasi asing sendiri telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Presiden Jokowi, sejak awal masa jabatannya, telah menerapkan kebijakan yang berfokus pada infrastruktur dan ekonomi terbuka untuk menarik investasi asing, terutama dari Tiongkok, salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia. Kebijakan ini mencakup inisiatif besar seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Meskipun ada sejumlah penelitian yang membahas investasi asing di Indonesia, ada keterbatasan dalam literatur yang secara khusus menganalisis dampak kebijakan Jokowi terhadap investasi Tiongkok di sektor infrastruktur.

Studi-studi sebelumnya lebih berfokus pada hubungan bilateral umum antara Indonesia dan Tiongkok tanpa menilai kebijakan spesifik dan pengaruhnya terhadap sektor-sektor strategis seperti infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana kebijakan Jokowi mempengaruhi aliran investasi asing di sektor infrastruktur, serta menilai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini akan membandingkan pengalaman Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola investasi Tiongkok, seperti Malaysia dan Vietnam, untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif. Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan manfaat ekonomi dari investasi asing sambil melindungi kepentingan nasional.

Selain itu, faktor-faktor yang lain, seperti hubungan diplomatik, stabilitas politik, dan kondisi ekonomi global, akan dianalisis untuk memahami bagaimana mereka mempengaruhi keberhasilan kebijakan investasi ini. Dampak sosial dan ekonomi dari investasi Tiongkok dalam konteks kebijakan Jokowi juga akan dibahas, dengan fokus pada manfaat bagi masyarakat lokal dan tantangan yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan aliran investasi asing secara berkelanjutan dan berkeadilan.

1.5.2. Liberalisme Ekonomi

Teori liberalisme adalah ideologi dan teori politik yang menekankan pentingnya kebebasan individu, hak asasi manusia, serta pemerintahan yang dibatasi. Pemikiran ini didasarkan pada gagasan filsuf seperti John Locke dan Montesquieu, yang memberikan dasar filosofis bagi konsep tersebut. Pada abad ke-17 dan ke-18, liberalisme pertama kali muncul ketika para pemikir politik mulai membahas cara-cara untuk mencapai keadilan, keteraturan, dan perdamaian di antara manusia. Seiring berjalannya waktu, liberalisme berkembang dengan menekankan optimisme, pengendalian diri, moderasi, dan kompromi, dengan tujuan menciptakan stabilitas serta perdamaian dalam tatanan internasional, seperti yang dijelaskan dalam buku *An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes* (2001). Dominasi perspektif liberalisme dalam hubungan internasional mulai terlihat setelah Perang Dunia I, ketika Presiden AS Woodrow Wilson menjadi pelopor dalam pembentukan Liga Bangsa-Bangsa untuk menerapkan konsep keamanan bersama, dengan tujuan untuk mencegah perang dan menciptakan perdamaian dunia.

Budi Hayanto (2002) menyatakan bahwa liberalisme berlandaskan pandangan bahwa manusia memiliki sifat baik dan mampu bekerja sama untuk menciptakan perdamaian tanpa kekerasan dan perang. Perspektif liberalisme mendorong kebijakan yang mengutamakan kebaikan bersama, bukan sekadar fokus pada kepentingan negara sebagai entitas tunggal dalam suatu kelompok. Menurut perspektif liberalisme, peran dan konflik dapat diminimalkan melalui kerja sama, reformasi, atau tindakan kolektif yang diprakarsai oleh para

pemimpin individu. Namun, hal ini tidak berarti bahwa konflik sepenuhnya dapat dihilangkan, karena konflik dapat bersifat positif dan konstruktif. Perspektif liberalisme juga mengasumsikan bahwa kerja sama dan keterlibatan internasional dapat terjadi selama semua pihak mematuhi norma-norma global dasar.

Robert Jackson dan Georg Sorensen berargumentasi bahwa perspektif liberalisme memandang hubungan internasional sebagai lebih kooperatif daripada konflikual, berbeda dengan pandangan realisme (Jackson & Sorensen, 1999). Dalam liberalisme, penekanan pada esensi seperti perdamaian, kompromi, pengendalian diri, dan sikap tidak berlebihan sangatlah jelas. Liberalisme menolak sentralisasi aktor dalam hubungan internasional hanya pada pemerintah atau negara, meskipun keberadaan mereka tetap dirasakan penting. Perspektif ini juga menganggap aktor non-negara seperti perusahaan multinasional (MNC), organisasi non-pemerintah (NGO), dan individu sebagai entitas yang sama pentingnya dalam konteks hubungan internasional. Teori Liberalism Ekonomi menjadi salah satu pendekatan utama dalam memahami dinamika hubungan ekonomi internasional. Kerja sama internasional merupakan inti dari liberalisme, yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip perdamaian dan kolaborasi, serta menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, dan pemerintahan yang terbatas. Menurut Charles W. Kegley, kerjasama internasional adalah usaha yang dilakukan oleh negara-negara dan aktor-aktor global untuk bekerja sama dengan damai dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dengan tujuan mencapai kepentingan bersama

(Kegley & Raymond, 1999). Kerjasama ini biasanya didasarkan pada ketergantungan bersama serta kesamaan tujuan di antara negara-negara tersebut.

Sebagai landasan teori yang signifikan dalam studi ekonomi politik internasional, pendekatan liberalisme menawarkan pandangan optimis mengenai manfaat kerja sama ekonomi antarnegara dan peran institusi internasional dalam mengatur interaksi ekonomi di tingkat global. Pendekatan ini diharapkan menciptakan lingkungan ekonomi yang mempromosikan pertumbuhan, kesejahteraan, dan stabilitas global. Foreign Direct Investment (FDI) dalam konteks liberalisme dilihat sebagai sarana memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan efisiensi. Dalam teori Liberalisme Ekonomi sendiri mempunyai prinsip yaitu Pasar bebas, Keterbukaan ekonomi dan yang terakhir adanya Kerjasama ekonomi Internasional.

Dengan demikian, kerjasama internasional secara umum terbentuk sebagai akibat dari interaksi dalam kehidupan internasional yang mencakup berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, pertahanan, dan keamanan. Interaksi tersebut menimbulkan beragam kepentingan yang pada gilirannya memunculkan berbagai masalah sosial. Dalam upaya menemukan solusi bagi masalah-masalah tersebut, para aktor dalam kerjasama internasional mengadakan suatu bentuk kerjasama yang dikenal sebagai kerjasama internasional. Ini mendorong kebijakan yang memfasilitasi kebebasan ekonomi dan perdagangan bebas sebagai cara untuk mencapai

kesejahteraan dan pembangunan. Secara garis besar bisa di simpulkan bahwa, liberalisme menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk memahami FDI dan potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu untuk menyeimbangkan manfaat ini dengan mempertimbangkan dampak negatif potensial dan memastikan bahwa FDI berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak. Menurut teori liberalisme, aktor non-negara memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Liberalisme menekankan perdamaian dan kerjasama internasional, sehingga teori ini dipilih penulis untuk membantu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Secara garis besar bahwa Hubungan antara liberalisme dan investasi asing sangat erat dan saling mendukung. Liberalisme menekankan pentingnya pasar bebas, kebebasan individu, dan kerja sama internasional untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran. Dalam konteks investasi asing, liberalisme mendukung penghapusan hambatan perdagangan dan investasi, menciptakan lingkungan kondusif bagi aliran modal internasional. Investasi asing langsung (FDI) adalah salah satu implementasi prinsip liberalisme dalam ekonomi global. FDI memungkinkan perusahaan asing berinvestasi di negara lain, membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Liberalisme melihat FDI sebagai cara untuk meningkatkan daya saing global, memperluas pasar, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara penerima investasi. Dalam kebijakan pemerintahan yang berorientasi liberal, seperti di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, kebijakan ekonomi cenderung lebih terbuka dan ramah terhadap investasi asing. Ini meliputi penghapusan tarif,

deregulasi, dan penyediaan insentif bagi investor asing, untuk menarik lebih banyak investasi yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Secara keseluruhan, liberalisme memberikan dasar teoretis untuk memahami dan mendukung investasi asing sebagai alat penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan teori Liberalisme ini yang sangat relevan dengan pendekatan kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Jokowi, yang Dimana kebijakan ini berusaha mendorong pertumbuhan melalui keterbukaan dan kerja sama ekonomi internasional.

1.5.3. Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA), yang diatur oleh undang-undang, mencakup investasi langsung yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, di mana pemodal bertanggung jawab langsung atas risiko dari investasinya (Aminuddin, 2017). Krugman sendiri menjelaskan bahwa PMA adalah aliran modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas operasinya di negara lain, yang melibatkan tidak hanya perpindahan sumber daya tetapi juga kontrol atas perusahaan di luar negeri (Sarwedi, 2002). Di Indonesia, *Foreign Direct Investment (FDI)* diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. FDI mencakup investasi nyata seperti pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, akuisisi barang modal, lahan, bahan baku, dan peralatan. Dalam hal ini, investor asing terlibat langsung dalam pengelolaan dan memiliki kendali atas perusahaan tersebut. FDI sering dilakukan oleh perusahaan

multinasional di sektor manufaktur, pengolahan, ekstraksi sumber daya alam, dan jasa (Yuniasih, 2011).

Anoraga dalam Yuniasih (2011) menyatakan bahwa investasi asing bisa dilakukan dalam dua bentuk: Investasi Portofolio dan bentuk lainnya. Investasi Portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan menggunakan instrumen seperti saham dan obligasi (Yuniasih, 2011). Dalam jenis investasi ini, dana yang diperoleh tidak selalu menciptakan lapangan kerja baru, meskipun terkadang digunakan untuk memperluas usaha dan membuka unit bisnis baru.

Investasi langsung, yang juga dikenal sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), merupakan bentuk investasi asing di mana investor membangun, membeli, atau mengakuisisi sebuah perusahaan secara utuh. Fokus utama dari jenis investasi ini adalah pada pengembangan investasi di sektor riil, yang dapat diikuti oleh investasi di sektor keuangan yang berkembang di kemudian hari. Menurut Rowland B.F. Pasaribu, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, PMA adalah investasi yang dilakukan melalui pembangunan, pembelian penuh, atau akuisisi suatu perusahaan di Indonesia. PMA melibatkan investor asing yang menjalankan usaha di Indonesia, baik dengan modal asing penuh maupun melalui kemitraan dengan investor domestik.

Dalam konteks penanaman modal asing, terdapat beberapa strategi kunci yang berperan penting dalam mencapai keberhasilan. Keberhasilan bagi investor dalam penanaman modal asing ditandai oleh adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan serta kepastian dalam investasi, disertai dengan

fasilitas yang memudahkan transfer keuntungan kembali ke negara asal investor, prospek profitabilitas yang menjanjikan tanpa beban pajak yang berlebihan, serta kemungkinan repatriasi modal, yang memungkinkan pengembalian modal ke pemerintah pusat atau daerah jika diperlukan, atau adanya kompensasi lainnya. Selain itu, terdapat jaminan hukum yang melindungi investor dari tindakan sewenang-wenang. Di sisi lain, bagi penerima investasi, mereka perlu memahami kondisi sosial, politik, dan ekonomi negara mereka, yang menjadi perhatian utama bagi investor. Penerima investasi juga harus menghindari tindakan yang dapat merugikan negara penerima, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, menerima transfer teknologi dari investor, dan melaksanakan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan prinsip saling menguntungkan, terutama dalam konteks pembangunan negara penerima. (Pasaribu R.B: 2013:239).

1.6 Operasionalisasi Konsep

Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif, peneliti perlu mengidentifikasi dan menjelaskan variabel-variabel yang dapat diukur. Pada tahap operasionalisasi konsep, penulis harus memberikan penjelasan yang jelas tentang konsep-konsep yang akan diteliti secara umum menurut pandangan para ahli, dan kemudian menguraikan definisi operasionalnya dalam konteks penelitian ini.

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1 Pasar Bebas

Pasar bebas sendiri adalah sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan tanpa adanya intervensi langsung dari pemerintah. Ide pasar bebas ini didasarkan pada prinsip kebebasan ekonomi, yang digagas oleh pemikir seperti Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776), di mana ia menyatakan bahwa "tangan tak terlihat" dari pasar akan memastikan efisiensi ekonomi serta kesejahteraan maksimal tanpa memerlukan regulasi yang berlebihan dari pemerintah.

1.6.1.2 Kerjasama Internasional

Definisi Kerjasama Internasional menurut Charles W. Kegley, bahwa kerjasama internasional adalah upaya negara-negara dan aktor internasional untuk bekerja sama secara damai dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, demi mencapai tujuan bersama, yang sering kali didasarkan pada saling ketergantungan dan kepentingan bersama di antara negara-negara.

1.6.1.3 Penanaman Modal Asing (PMA)

PMA sendiri memiliki defisi Investasi yang dilakukan oleh entitas asing di dalam negeri, termasuk dalam bentuk modal, teknologi, atau aset lainnya.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1. Pasar bebas

Dalam penelitian ini, pasar bebas dioperasionalkan sebagai sistem di mana pemerintah Indonesia memfasilitasi kebebasan ekonomi bagi investor asing melalui deregulasi, insentif pajak, dan minimnya intervensi. Melalui Omnibus Law dan Online Single Submission (OSS), pemerintah menyederhanakan perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi. Insentif pajak, seperti tax holiday, juga diberikan untuk menarik investor di sektor strategis. Dengan mengurangi intervensi langsung dalam pengaturan harga, pelaku usaha memiliki kebebasan lebih dalam pengambilan keputusan, sehingga menciptakan iklim investasi yang kompetitif.

1.6.2.2 Kerjasama Internasional

Dalam penelitian ini mengacu pada interaksi antara negara-negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Kerjasama ini terjadi karena adanya saling ketergantungan antarnegara serta kebutuhan untuk memajukan kepentingan bersama dalam tatanan global yang semakin kompleks. Hubungan Bilateral Indonesia dan Tiongkok menjalin kerjasama di bidang investasi, terutama melalui proyek-proyek infrastruktur strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Contohnya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melibatkan investor Tiongkok. Perjanjian Ekonomi dan Investasi Kesepakatan bilateral yang dilakukan untuk memfasilitasi arus investasi dari Tiongkok ke Indonesia, terutama dalam konteks Belt and Road Initiative (BRI), yang bertujuan

memperkuat hubungan ekonomi dan infrastruktur antarnegara. Saling Ketergantungan Ekonomi Indonesia menyediakan sumber daya dan pasar yang besar bagi Tiongkok, sementara Tiongkok memberikan modal dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Kerjasama ini didasari oleh prinsip saling menguntungkan bagi kedua negara.

1.6.2.3 Penanaman Modal Asing (PMA)

Definisi Operasional Penanaman Modal Asing (PMA) dalam konteks penelitian ini mengacu pada aliran modal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk membangun atau memperluas usaha di sektor-sektor tertentu seperti infrastruktur, energi, atau manufaktur. Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) mencakup investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari negara lain ke dalam perusahaan atau proyek di Indonesia, yang memberikan kontrol langsung kepada investor asing. Dalam penelitian ini, PMA sendiri dioperasionalkan dalam 3 Indikator:

1. Investasi Langsung: FDI melibatkan pembangunan atau akuisisi perusahaan di Indonesia oleh investor asing, di mana modal asing digunakan untuk membangun pabrik, fasilitas produksi, atau proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
2. Kerjasama dengan Investor Domestik: PMA juga dapat melibatkan joint venture antara perusahaan asing dengan mitra lokal, di mana modal asing dan lokal bekerja sama untuk mengembangkan bisnis di Indonesia.
3. Kebijakan Insentif dan Deregulasi: Kebijakan-kebijakan pemerintah seperti Omnibus Law dan Paket Kebijakan Ekonomi yang memberikan

insentif pajak dan menyederhanakan prosedur perizinan merupakan faktor kunci dalam menarik PMA dari negara-negara seperti Tiongkok.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme Ekonomi untuk menjelaskan bagaimana kebijakan keterbukaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Joko Widodo telah mendorong peningkatan investasi asing, terutama dari Tiongkok. Kebijakan ini, yang mencakup deregulasi, insentif pajak, dan reformasi birokrasi, berhasil menarik investasi yang signifikan di sektor infrastruktur. Penanaman Modal Asing (PMA) dari Tiongkok menjadi salah satu sumber utama modal untuk pembangunan proyek-proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan kereta api, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Investasi Tiongkok tidak hanya berdampak positif pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong transfer teknologi. Namun, tantangan seperti ketergantungan ekonomi pada investasi asing dan dampak sosial pada tenaga kerja lokal perlu diantisipasi oleh pemerintah. Melalui kerjasama ekonomi internasional, seperti inisiatif Belt and Road, Indonesia berhasil memperkuat hubungan bilateral dengan Tiongkok, yang memberikan manfaat ekonomi dan diplomatik. Hipotesis dalam penelitian ini sekaligus tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Jokowi terhadap investasi asing yang datang dari Tiongkok, khususnya di sektor infrastruktur Indonesia. Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan

berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi asing. Hal ini meliputi deregulasi kebijakan ekonomi, penyederhanaan birokrasi, serta pengembangan infrastruktur besar-besaran melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan infrastruktur di bawah Pemerintah Jokowi Dodo, akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan aliran investasi dari Tiongkok. Aliran investasi tersebut diperkirakan tidak hanya meningkatkan volume investasi tetapi juga kualitas dari proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh modal Tiongkok, seperti pembangunan jaringan transportasi dan energi.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmiah yang tidak melibatkan perhitungan matematis, melainkan fokus pada karakteristik alami dari sumber data. Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan data kualitatif dengan mendokumentasikan berbagai sumber resmi seperti jurnal ilmiah, situs web resmi, buku, dan penelitian sebelumnya.

1.8.1.1 Tipe penelitian

Jenis penelitian ini adalah analisis, dan karena pendekatannya kualitatif, hasilnya bersifat analisis-deskriptif. Menurut Habibi & Aprilian (2020:78) menyatakan bahwa analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu

dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Data yang dikumpulkan berupa dokumentasi tertulis, termasuk jurnal, buku, situs web resmi, serta kebijakan pemerintah di bawah Presiden Jokowi Dodo. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, jelas, dan sistematis tentang kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berpotensi mempengaruhi peningkatan investasi China di Indonesia, serta dampaknya terhadap perkembangan investasi tersebut.

1.8.1.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui metode *desk research*. Metode penelitian ini menggunakan informasi dari sumber sekunder yang sudah tersedia. Prosesnya melibatkan pencarian dan analisis literatur, dokumen, laporan, data online, serta publikasi relevan lainnya, seperti buku, artikel jurnal, laporan riset, statistik resmi, situs web, atau arsip dokumen (Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. 2019).

1.8.1.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kebijakan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo, khususnya yang terkait dengan peningkatan investasi dari Tiongkok. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan keterbukaan ekonomi dan deregulasi yang diterapkan oleh pemerintah Jokowi mempengaruhi masuknya PMA, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

infrastruktur. Subjek ini dipilih untuk mengevaluasi relevansi dan efektivitas teori Liberalisme Ekonomi dalam konteks kebijakan investasi asing di Indonesia.

1.8.1.4 Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dan dipakai dalam Penelitian ini adalah data sekunder yang dimana di peroleh dari melalui studi kepustakaan.

1.8.1.5 Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber data yang relevan dan akuntabel. Sumber data tersebut antara lain data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh dari situs resmi laman dan Laporan Pemerintah, Laporan Studi Organisasi Internasional, Jurnal akademik dan Artikel Ilmiah, Data Institusi keuangan sedangkan data sekunder diperoleh dari konsultan serta reportase, wawancara dengan narasumber yang memiliki kredibilitas terkait topik penelitian, dan artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.1.6 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan pencarian data secara intensif dan terarah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial atau fisik yang relevan dengan topik penelitian. Dalam arti luas, penelitian ini

melibatkan berbagai aktivitas pengumpulan data, informasi, dan fakta untuk pengembangan pengetahuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup: Metode Berbasis Dokumen / Dokumentasi yang dimana Metode ini adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian hubungan internasional, terutama oleh mahasiswa Hubungan Internasional di Indonesia. Menurut Peter Burnham (et.al) dalam Bakri (2016:171), bahan dokumen dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: dokumen primer, dokumen sekunder, dan dokumen tersier.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan meliputi buku, jurnal, skripsi, dan dokumen dari instansi terkait. Penulis memanfaatkan dokumentasi sekunder, seperti buku, jurnal, data arsip, serta dokumentasi tentang kebijakan penanaman modal asing di pemerintahan Joko Widodo dan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Bakri, 2016:171).

1.8.1.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam menyusun penelitian kualitatif ini, penulis mengumpulkan data yang kredibel dan relevan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, penulis menganalisis data tersebut secara logis untuk menyusunnya menjadi suatu struktur yang sistematis. Penelitian ini mengadopsi pendekatan process tracing dalam interpretasi data, yaitu metode yang menganalisis suatu kasus dengan mengidentifikasi hubungan antara

rangkaian kejadian penting di dalamnya. Dengan menggunakan process tracing, diharapkan peneliti dapat mengungkap hubungan kausal dalam kasus tersebut.

1.8.1.8 Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang kredibel dan akuntabel yang dibuktikan dengan pencantuman sumber-sumber tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang dibagi dan disusun atas empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Memuat pendahuluan yang berfungsi sebagai desain riset dari penelitian ini.

Bab II Politik Investasi Asing di Indonesia: Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo dan Peningkatan Investasi Tiongkok

Memuat deskripsi mengenai kebijakan investasi asing di Indonesia di bawah Pemerintahan Joko Widodo serta perkembangan dan peningkatan investasi Tiongkok di Indonesia.

Bab III Analisis Dampak Kebijakan Investasi Asing Pemerintahan Joko Widodo terhadap Peningkatan Investasi Tiongkok

Memuat analisis mengenai dampak kebijakan investasi asing yang diterapkan oleh Pemerintahan Joko Widodo terhadap peningkatan investasi Tiongkok di Indonesia.

Bab IV Penutup

Memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.